

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitian berkaitan dengan Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuisioner yang disebar kepada 105 orang dari Sub Bagian BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Dalam variabel Anggaran Berbasis Kinerja terdiri dari 4 *item* pernyataan, variabel Sistem Pelaporan keuangan terdiri dari 4 *item* pernyataan dan variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah juga terdiri dari 4 *item* pernyataan.

Selanjutnya data yang telah terkumpul kemudian dikodekan (*coding*) serta diolah menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui tanggapan responden terhadap setiap variabel yang diteliti, kemudian dilanjutkan dengan analisis *Structural Equation Modelling (SEM)* menggunakan *Partial Least Square (PLS)* untuk menganalisis Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah. Berikut tabel data distribusi sampel penelitian:

**Tabel 4.1**  
**Data Distribusi Sampel Penelitian**

No	BIDANG	PNS
1	SEKRETARIAT	19
2	AKUNTANSI DAN PELAPORAN	8
3	ASET	13
4	ANGGARAN	6
5	PERBENDAHARAAN	13

6	PAJAK DAERAH I	23
7	PAJAK DAERAH II	23
	JUMLAH	105

#### 4.1.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner (*Response Rate*)

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu peneliti menyebarkan kuesioner kepada objek penelitian. Kuesioner ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang ingin diketahui oleh peneliti. Rincian pengembalian kuesioner (*response rate*) kepada 105 orang dari Sub Bagian BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.2**  
*Respon Rate*

Keterangan	Jumlah	Keterangan
Kuesioner yang Disebar	105	Sampel
Kuesioner yang Tidak Kembali	0	
Kuesioner yang Kembali	105	
<b>Tingkat Pengembalian (<i>Response Rate</i>)</b> <b>(105/105 x 100%)</b>	<b>100%</b>	-

Sumber: Hasil pengolahan data uji alat ukur, 2019

Berdasarkan tabel di atas, tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) adalah sebesar 100%, yang didapatkan dan dihitung dari persentase jumlah kuesioner yang kembali (105 kuesioner) dibagi jumlah kuesioner yang disebar (105 kuesioner). Tingkat pengembalian kuisioner (*response rate*) sebesar 100% dan termasuk kriteria *excellent*, artinya tingkat pengembalian kuisioner (*response rate*) dapat diterima dan hasil jawaban kuisioner dapat diolah, karena *response rate* lebih besar dari krieria *acceptable* (dapat diterima), (Yang dan Miller, 2008:231).

#### 4.1.2 Profil Responden

Responden pada penelitian ini adalah kepada 105 orang dari Sub Bagian BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Karakteristik responden yang akan diuraikan berikut ini meliputi jenis kelamin, pendidikan terakhir, usia dan lama kerja.

#### 4.1.3 Pengukuran Kualitas Alat Ukur Penelitian

Sebelum dianalisis, data hasil penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk menguji apakah alat ukur yang digunakan memiliki kesahihan (*validity*) dan keandalan (*reliability*) berupa butir *item* pernyataan yang diajukan kepada responden telah mengukur secara cermat dan tepat apa yang ingin diukur pada penelitian ini.

##### 4.1.3.1 Validitas

Pengujian validitas ini digunakan dengan tujuan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu alat ukur dinyatakan valid atau sah apabila memiliki nilai koefisien validitas  $> 0,30$ . Dengan menggunakan *software* SPSS 16.0, diperoleh hasil uji sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
Rekapitulasi Hasil Pengujian Validitas Instrumen

Variabel	No.	Koefisien Validitas	Titik Kritis	Keterangan
Anggaran Berbasis Kinerja (X1)	Item 1	0,750	0,3	Valid
	Item 2	0,861	0,3	Valid
	Item 3	0,863	0,3	Valid
	Item 4	0,688	0,3	Valid

Sistem Pelaporan keuangan (X2)	Item 5	0,797	0,3	Valid
	Item 6	0,760	0,3	Valid
	Item 7	0,781	0,3	Valid
	Item 8	0,783	0,3	Valid
Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Y)	Item 9	0,811	0,3	Valid
	Item 10	0,761	0,3	Valid
	Item 11	0,775	0,3	Valid
	Item 12	0,865	0,3	Valid

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019

Pada tabel di atas, dapat dilihat seluruh pernyataan yang digunakan untuk mengukur ketiga variabel memiliki koefisien validitas yang lebih besar dari nilai kritis yaitu 0,3 ( $>0,30$ ), sehingga seluruh pernyataan tersebut dinyatakan valid.

#### 4.1.3.2 Reliabilitas

Pengujian reliabilitas ini dimaksudkan untuk menguji keandalan dari suatu alat ukur penelitian. Dalam penelitian ini, untuk menguji keandalan dari alat ukur digunakan tehnik belah dua atau sering disebut *Split Half*. Dengan menggunakan *software* SPSS 16.0, diperoleh hasil uji sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Rekapitulasi Hasil Pengujian Reliabilitas Kuesioner**

Variabel	<i>Spearman Brown</i>	Titik Kritis	Kesimpulan
Anggaran Berbasis Kinerja (X1)	0,931	0,6	Reliabel
Sistem Pelaporan keuangan (X2)	0,745	0,6	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Y)	0,862	0,6	Reliabel

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019

Nilai koefisien reliabilitas untuk masing-masing variabel seperti terlihat pada tabel di atas lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel dan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh responden berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang diajukan sebagai acuan studi ini, dapat dipercaya (reliabel) atau andal.

#### **4.1.4 Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mengetahui gambaran tanggapan responden terhadap setiap pernyataan yang diajukan maupun variabel penelitian secara keseluruhan yang meliputi Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah. Dalam penelitian ini, tanggapan responden terhadap setiap pernyataan akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan persentase sehingga mempermudah peneliti dalam menjelaskan hasil tanggapan responden.

##### **4.1.4.1 Tanggapan Responden Mengenai Anggaran Berbasis Kinerja**

Untuk mengetahui persepsi atau tanggapan responden terhadap setiap indikator mengenai Anggaran Berbasis Kinerja, penulis menggunakan nilai persentase skor.

Pada variabel Anggaran Berbasis Kinerja terdiri dari 4 (empat) *item* indikator: Orientasi yang sama pada hasil, Penerapan rencana kinerja tahunan, Pengembangan indikator kinerja, Sistem pengumpulan data kinerja. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Orientasi yang sama pada hasil**

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		5	4	3	2	1	
P1	F	0	50	41	14	0	351
	%	0,0%	47,6%	39,0%	13,3%	0,0%	66,86%
Skor total							351

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2019

Tabel di atas merupakan rekapitulasi jawaban responden pada indikator Orientasi yang sama pada hasil yang di ukur menggunakan satu *item* pernyataan sebagai berikut:

Tanggapan pada butir pernyataan nomor 1, Apakah Hasil kinerja bapak/ibu sudah sesuai target atasan, memiliki skor tertinggi sebesar 50 responden (47,6%) menjawab sesuai, selanjutnya 41 responden (39,0%) menjawab cukup sesuai, 14 responden (13,3%) menjawab tidak sesuai. Skor tanggapan responden sebesar 66,86% (cukup baik). Bahwa pernyataan nomor 1 mengeling terhadap fenomena ownership pimpinan.

**Tabel 4.6**  
**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Penerapan rencana kinerja tahunan**

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		5	4	3	2	1	
P2	F	0	28	57	20	0	323
	%	0,0%	26,7%	54,3%	19,0%	0,0%	<b>61,52%</b>
Skor total							323

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2019

Tabel di atas merupakan rekapitulasi jawaban responden pada Penerapan rencana kinerja tahunan yang di ukur menggunakan satu *item* pernyataan sebagai berikut:

Tanggapan pada butir pernyataan nomor 2, Apakah Penerapan rencana kinerja tahunan sudah sesuai dengan kinerja instansi, memiliki skor tertinggi sebesar 57 responden (54,3%) menjawab cukup sesuai, selanjutnya 28 responden (26,7%) menjawab sesuai, dan 20 responden (19,0%) menjawab tidak sesuai. Skor tanggapan responden sebesar 61,52% (cukup baik) dan masih terdapat *gap* sebesar 38,48%, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Penerapan rencana kinerja tahunan.

**Tabel 4.7**  
**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Pengembangan indikator kinerja**

Pernyataan		Skor Jawaban					%
		5	4	3	2	1	Skor
P3	F	2	32	51	20	0	331
	%	1,9%	30,5%	48,6%	19,0%	0,0%	<b>63,05%</b>
Skor total							331

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2019

Tabel di atas merupakan rekapitulasi jawaban responden pada indikator Pengembangan indikator kinerja yang di ukur menggunakan satu *item* pernyataan sebagai berikut:

Tanggapan pada butir pernyataan nomor 3, Apakah Program kinerja yang ada di instansi sudah sesuai dengan yang diharapkan bapak/ibu, memiliki skor tertinggi sebesar 51 responden (48,6%) masing-masing menjawab cukup sesuai, selanjutnya 32 responden (30,5%) menjawab sesuai, selanjutnya 20 responden

(19,0%) menjawab tidak sesuai, selanjutnya 2 responden (1,9%) menjawab sangat sesuai. Skor tanggapan responden sebesar 63,05% (cukup baik). Hal ini menandakan adanya masalah pada indikator ini.

**Tabel 4.8**  
**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Sistem pengumpulan data kinerja**

Pernyataan		Skor Jawaban					%
		5	4	3	2	1	Skor
P4	F	0	25	69	11	0	329
	%	0,0%	23,8%	65,7%	10,5%	0,0%	62,67%
Skor total							329

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2019

Tabel di atas merupakan rekapitulasi jawaban responden pada indikator Sistem pengumpulan data kinerja yang di ukur menggunakan satu *item* pernyataan sebagai berikut:

Tanggapan pada butir pernyataan nomor 4, Apakah Sistem pengumpulan data kinerja sudah sesuai dengan kinerja yang ada diintansi, memiliki skor tertinggi sebesar 69 responden (65,7%) menjawab cukup sesuai, selanjutnya 25 responden (23,8%) menjawab sesuai, selanjutnya 11 responden (10,5%) menjawab tidak sesuai. Skor tanggapan responden sebesar 62,67% (cukup baik). Bahwa pernyataan nomor 4 mengeling terhadap fenomena sistem informasi.

**Tabel 4.9**  
**Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Variabel Anggaran Berbasis Kinerja**

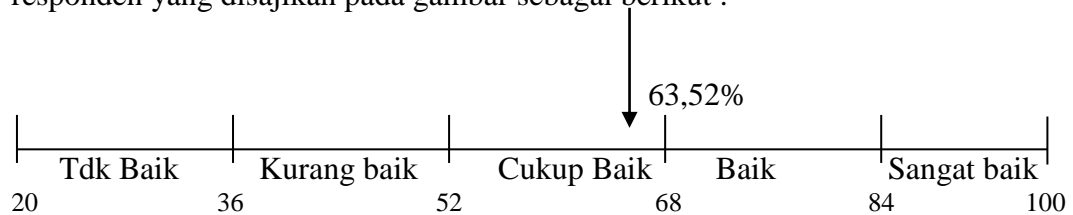
No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Orientasi yang sama pada hasil	351	525	66,86%	Cukup Baik



2	Penerapan rencana kinerja tahunan	323	525	61,52%	Cukup Baik
3	Pengembangan indikator kinerja	331	525	63,05%	Cukup Baik
4	Sistem pengumpulan data kinerja	329	525	62,67%	Cukup Baik
<b>Total</b>		<b>1334</b>	<b>2100</b>	<b>63,52%</b>	<b>Cukup Baik</b>

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2019

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.9 di atas tersebut diinterpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut :



Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Anggaran Berbasis Kinerja sebesar 1334 (63,52%) berada di antara interval 52,01% - 68,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Anggaran Berbasis Kinerja berada dalam kategori cukup baik, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Anggaran Berbasis Kinerja.

#### 4.1.4.2 Tanggapan Responden Mengenai Sistem Pelaporan keuangan

Untuk mengetahui persepsi atau tanggapan responden terhadap setiap indikator mengenai Sistem Pelaporan keuangan, penulis menggunakan nilai persentase skor.

Pada variabel Sistem Pelaporan keuangan terdiri dari 4 (empat) *item* indikator. Indikator-indikator tersebut adalah Dapat dipahami, Relevan,

Keandalan, Dapat diperbandingkan. Berikut rekapitulasi dari indikator-indikator Sistem Pelaporan keuangan:

**Tabel 4.10**  
**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Dapat dipahami**

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		5	4	3	2	1	
P5	F	0	34	62	9	0	340
	%	0,0%	32,4%	59,0%	8,6%	0,0%	64,76%
Skor total							340

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2019

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.10 diatas memberikan gambaran mengenai indikator Dapat dipahami.

Tanggapan pada butir pernyataan nomor 5, Apakah Sistem Pelaporan Keuangan yang ada di BPKD dapat dipahami, memiliki skor tertinggi sebesar 62 responden (59%) menjawab cukup dapat dipahami, selanjutnya 34 responden (32,4%) menjawab dapat dipahami, selanjutnya 9 responden (8,6%) yang menjawab tidak dapat dipahami. Skor tanggapan responden sebesar 64,76% (cukup baik). Yang menandakan masih adanya kelemahan pada indikator ini.

**Tabel 4.11**  
**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Relevan**

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		5	4	3	2	1	
P6	F	2	32	50	21	0	330
	%	1,9%	30,5%	47,6%	20,0%	0,0%	62,86%
Skor total							330

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2019

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.11 diatas memberikan gambaran mengenai indikator Relevan.

Tanggapan pada butir pernyataan nomor 6, Laporan Keuangan yang dibuat di BPKD, memiliki skor tertinggi sebesar 50 responden (47,6%) menjawab cukup andal, selanjutnya 32 responden (30,5%) menjawab andal, selanjutnya 21 responden (20,0%) menjawab tidak andal. Skor tanggapan responden sebesar 62,86% (cukup baik). Hal ini menandakan adanya masalah pada indikator ini.

**4.12**  
**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada**  
**Indikator Keandalan**

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		5	4	3	2	1	
P7	F	0	43	42	20	0	338
	%	0,0%	41,0%	40,0%	19,0%	0,0%	<b>64,38%</b>
Skor total							338

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2019

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.12 diatas memberikan gambaran mengenai indikator Keandalan.

Tanggapan pada butir pernyataan nomor 7, Informasi laporan keuangan yang dihasilkan di BPKD, memiliki skor tertinggi sebesar 43 responden (41,0%) masing-masing menjawab tepat waktu, selanjutnya 42 responden (40,0%) menjawab cukup tepat waktu, selanjutnya 20 responden (19,0%) menjawab cukup tidak tepat waktu. Skor tanggapan responden sebesar 64,38% (cukup baik). Ini dikategorikan cukup baik karena berada pada interval 52,01% – 68,00%, sehingga dapat diketahui bahwa masih terdapat kelemahan dalam Keandalan.

**4.13**  
**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada**  
**Indikator Dapat diperbandingkan**

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		5	4	3	2	1	
P8	F	0	48	43	14	0	349
	%	0,0%	45,7%	41,0%	13,3%	0,0%	<b>66,48%</b>
Skor total							349

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2019

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.13 diatas memberikan gambaran mengenai Dapat diperbandingkan.

Tanggapan pada butir pernyataan nomor 8, Informasi yang disajikan oleh BPKD dalam periode sebelumnya dan entitas laporan lain pada umumnya, memiliki skor tertinggi sebesar 48 responden (45,7%) menjawab dapat di bandingkan, selanjutnya 43 responden (41,0%) menjawab cukup dapat dibandingkan, 14 responden (13,3%) menjawab tidak dapat di bandingkan. Skor tanggapan responden sebesar 66,48% (cukup baik). Ini dikategorikan cukup baik karena berada pada interval 52,01% – 68,00%, sehingga dapat diketahui bahwa masih terdapat kelemahan dalam Melaporkan penyeteran tersebut ke DJP.

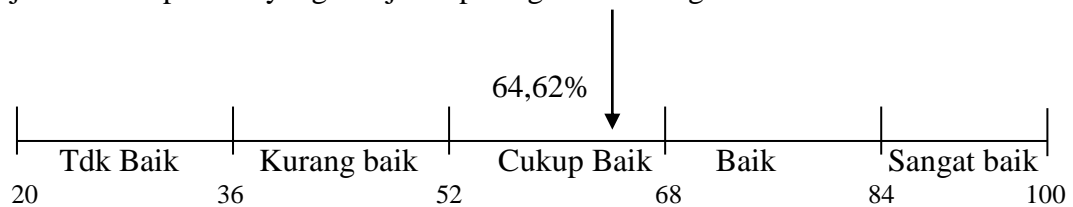
**Tabel 4.14**  
**Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai**  
**Variabel Sistem Pelaporan keuangan**

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Dapat dipahami	340	525	64,76%	Cukup Baik
2	Relevan	330	525	62,86%	Cukup Baik
3	Keandalan	338	525	64,38%	Cukup

					<b>Baik</b>
4	Dapat diperbandingkan	<b>349</b>	<b>525</b>	<b>66,48%</b>	<b>Cukup Baik</b>
	<b>Total</b>	<b>1357</b>	<b>2100</b>	<b>64,62%</b>	<b>Cukup Baik</b>

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2019

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.14 di atas tersebut diinterpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut :



Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Sistem Pelaporan keuangan sebesar 1357 (64,62%) berada di antara interval 52,01% - 68,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Pelaporan keuangan berada dalam kategori cukup baik, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Sistem Pelaporan keuangan.

#### **4.1.4.3 Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah**

Untuk mengetahui persepsi atau tanggapan responden terhadap setiap indikator mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, penulis menggunakan nilai persentase skor.

Pada variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah terdiri dari 4 (empat) *item* indikator: Pengelolaan organisasi secara efektif, Pengelolaan

organisasi secara efisien, Tujuan, Pertanggung jawaban program. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.15**  
**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator**  
**Pengelolaan organisasi secara efektif**

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		5	4	3	2	1	
P9	F	0	49	48	8	0	356
	%	0,0%	46,7%	45,7%	7,6%	0,0%	<b>67,81%</b>
Skor total							356

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2019

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.15 diatas memberikan gambaran mengenai indikator Pengelolaan organisasi secara efektif.

Tanggapan pada butir pernyataan nomor 9, Apakah pola kinerja manajerial sudah efektif di BPKD, memiliki skor tertinggi sebesar 49 responden (46,7%) menjawab efektif, selanjutnya 48 responden (45,7%) menjawab cukup efektif, selanjutnya 8 responden (7,6%) menjawab tidak efektif. Skor tanggapan responden sebesar 67,81% (cukup baik). Yang menandakan adanya masalah pada indikator sikap memabntu dan melayani dari aparat.

**Tabel 4.16**  
**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator**  
**Pengelolaan organisasi secara efisien**

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		5	4	3	2	1	
P10	F	0	42	43	20	0	337
	%	0,0%	40,0%	41,0%	19,0%	0,0%	<b>64,19%</b>
Skor total							337

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2019

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.16 diatas memberikan gambaran mengenai indikator Pengelolaan organisasi secara efisien.

Tanggapan pada butir pernyataan nomor 11, Apakah pola kinerja manajerial sudah memuaskan di organisasi BPKD, memiliki skor tertinggi sebesar 43 responden (41,0%) menjawab cukup memuaskan, selanjutnya 42 responden (40,0%) menjawab memuaskan, selanjutnya 20 responden (19,0%) yang menjawab tidak memuaskan. Skor tanggapan responden sebesar 64,19% (cukup baik) yang menandakan adanya masalah pada indikator ini.

**Tabel 4.17**  
**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator**  
**Dapat Tujuan**

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		5	4	3	2	1	
P11	F	0	30	54	21	0	324
	%	0,0%	28,6%	51,4%	20,0%	0,0%	61,71%
Skor total							324

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2019

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.17 diatas memberikan gambaran mengenai indikator Tujuan.

Tanggapan pada butir pernyataan nomor 11, Apakah Kinerja yang dihasilkan oleh BPKD sudah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi yang ada diintansi, memiliki skor tertinggi sebesar 54 responden (51,4%) menjawab cukup sesuai, selanjutnya 30 responden (28,6%) menjawab sesuai, selanjutnya 21 responden (20,0%) yang menjawab tidak sesuai. Skor tanggapan responden sebesar 61,71% (cukup baik) yang menandakan adanya masalah pada indikator ini.

**Tabel 4.18**  
**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator**  
**Pertanggung jawaban program**

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		5	4	3	2	1	
P12	F	0	48	43	14	0	<b>349</b>
	%	0,0%	45,7%	41,0%	13,3%	0,0%	<b>66,48%</b>
Skor total							349

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2019

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.18 diatas memberikan gambaran mengenai indikator Tujuan.

Tanggapan pada butir pernyataan nomor 12, Apakah perencanaan yang ada diintansi bapak/ibu sesuai dengan anggaran yang ada di BPKD, memiliki skor tertinggi sebesar 48 responden (45,7%) menjawab sesuai, selanjutnya 43 responden (41,0%) menjawab cukup sesuai, selanjutnya 14 responden (13,3%) menjawab tidak sesuai. Skor tanggapan responden sebesar 66,48 (cukup baik) yang menandakan adanya masalah pada indikator ini.

**Tabel 4.19**  
**Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai**  
**Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah**

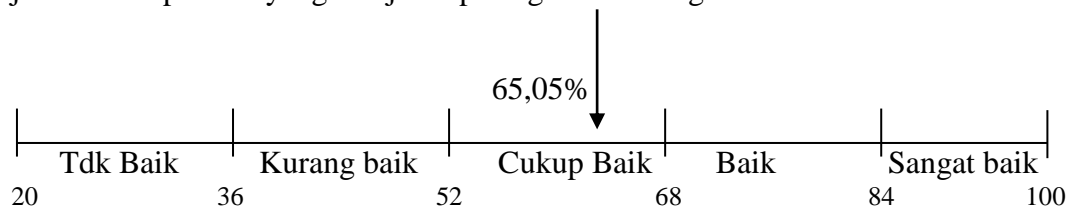
No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Pengelolaan organisasi secara efektif	356	525	67,81%	Cukup Baik
2	Pengelolaan organisasi secara efisien	337	525	64,19%	Cukup Baik
3	Tujuan	324	525	61,71%	Cukup



					Baik
4	Pertanggung jawaban program	349	525	66,48%	Cukup Baik
	<b>Total</b>	<b>1366</b>	<b>2100</b>	<b>65,05%</b>	<b>Cukup Baik</b>

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2019

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.19 di atas tersebut diinterpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut :



Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah sebesar 1366 (65,05%) berada di antara interval 52,01% - 68,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah berada dalam kategori cukup baik, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.

#### 4.1.5 Analisis Verifikatif

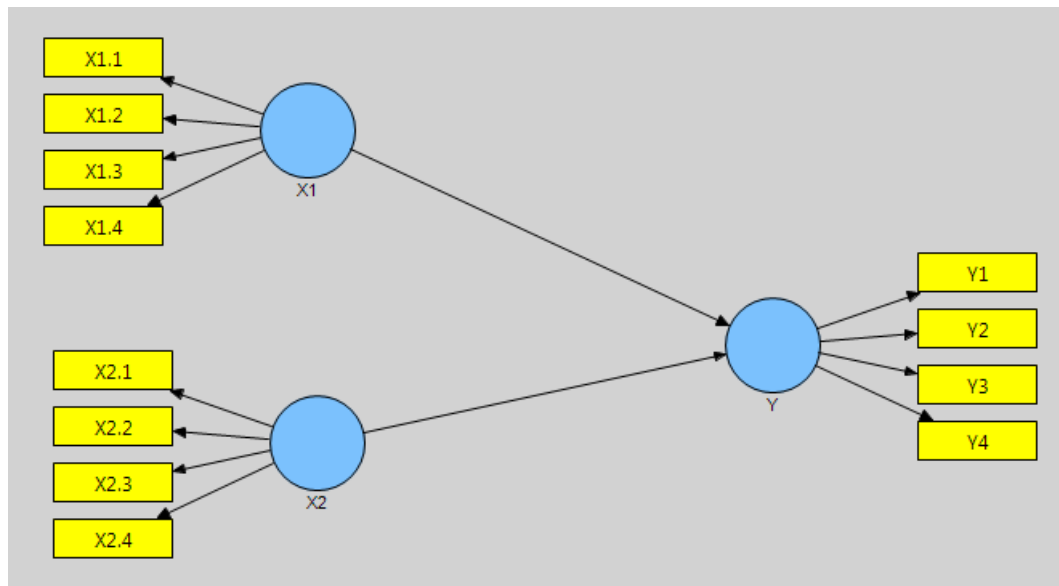
Analisis verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis berdasarkan hasil perhitungan statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah diduga adanya Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis konseptual tersebut adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) melalui pendekatan *Partial Least Square* (PLS).

Dalam *Structural Equation Modeling* ada dua jenis model yang terbentuk, yakni model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*). Model pengukuran menjelaskan proporsi varian setiap variabel manifes (indikator) yang dapat dijelaskan dalam variabel laten. Melalui model pengukuran akan diketahui indikator mana saja yang dominan dalam pembentukan variabel laten. Setelah model pengukuran setiap variabel laten diuraikan, selanjutnya diuraikan model struktural yang akan mengkaji pengaruh masing-masing variabel laten eksogen (*exogenous latent variable*) terhadap variabel laten endogen (*endogenous latent variable*).

Pada penelitian ini, terdapat 12 variabel manifes dan 3 variabel laten yakni Anggaran Berbasis Kinerja ( $X_1$ ) yang dikur dengan 4 variabel manifes, Sistem Pelaporan keuangan ( $X_2$ ) dengan 4 variabel manifes dan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah ( $Y$ ) dengan 4 variabel manifes.

Pada bagian ini akan disajikan hasil analisis verifikatif mengenai Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah menggunakan *software SmartPLS*.

Berikut akan disajikan model yang akan diujikan dalam penelitian ini.



**Gambar 4.1**  
**Model Penelitian**

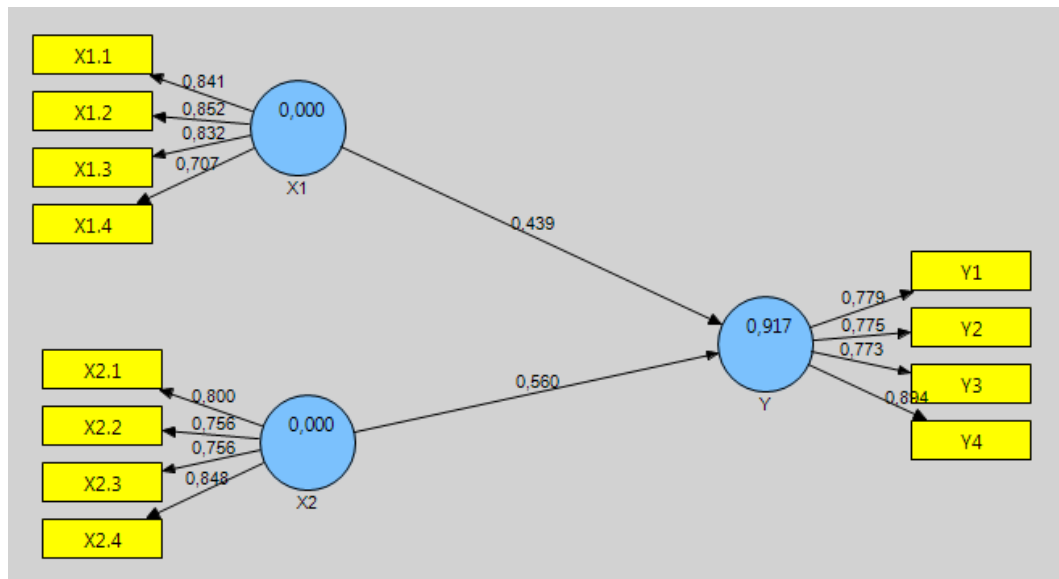
**Keterangan:**

$X_1$  = Anggaran Berbasis Kinerja  
 $X_{1.1}$  = Orientasi yang sama pada hasil  
 $X_{1.2}$  = Penerapan rencana kinerja tahunan  
 $X_{1.3}$  = Pengembangan indikator kinerja  
 $X_{1.4}$  = Sistem pengumpulan data kinerja

$X_2$  = Sistem Pelaporan keuangan  
 $X_{2.1}$  = Dapat dipahami  
 $X_{2.2}$  = Relevan  
 $X_{2.3}$  = Keandalan  
 $X_{2.4}$  = Dapat diperbandingkan

$Y$  = Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah  
 $Y_1$  = Pengelolaan organisasi secara efektif  
 $Y_2$  = Pengelolaan organisasi secara efisien  
 $Y_3$  = Tujuan  
 $Y_4$  = Pertanggung jawaban program

Hasil perhitungan dari keseluruhan model menggunakan *SmartPLS 2.0* adalah sebagai berikut:



**Gambar 4.2**  
**Diagram Jalur Model Lengkap**

Pengujian hasil *struktural equation modelling* dengan pendekatan PLS dilakukan dengan melihat hasil model pengukuran (*outer model*) dan hasil model struktural (*inner model*) dari model yang diteliti.

#### 4.1.5.1 Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi terhadap *outer model* digunakan untuk melihat hubungan antara variabel laten dengan indikator atau variabel *manifestnya* (*measurement model*). Untuk mengevaluasi *outer model*, digunakan pengujian validitas dan reliabilitas. Dalam uji validitas dalam *Partial Least Square* (PLS) terbagi atas dua bagian yakni *Convergent Validity* dan *Discriminant Validity*.

### 1. Uji Validitas

#### a. *Convergent Validity*

*Convergent validity* berhubungan dengan prinsip bahwa indikator dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Uji *convergent validity* dengan

*software SmartPLS* dapat dilihat dari nilai *outer loading* untuk tiap indikator konstruk, adapun untuk menilai *convergent validity* nilai *outer loading* harus lebih dari 0,5-0,6 tergolong cukup, sedangkan jika lebih besar dari 0,7 maka dikatakan tinggi, serta nilai *average variance extracted* (AVE) dan nilai *communality* harus  $\geq 0,5$ .

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *software SmartPLS 2.0*, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.20**  
***Loading Factor***

Variabel Manifes		Loading Faktor	Keterangan
X <sub>1.1</sub>	Orientasi yang sama pada hasil	0,841	Valid
X <sub>1.2</sub>	Penerapan rencana kinerja tahunan	0,852	Valid
X <sub>1.3</sub>	Pengembangan indikator kinerja	0,832	Valid
X <sub>1.4</sub>	Sistem pengumpulan data kinerja	0,707	Valid
Variabel Manifes		Loading Faktor	Keterangan
X <sub>2.1</sub>	Dapat dipahami	0,800	Valid
X <sub>2.2</sub>	Relevan	0,756	Valid
X <sub>2.3</sub>	Keandalan	0,756	Valid
X <sub>2.4</sub>	Dapat diperbandingkan	0,848	Valid
Variabel Manifes		Loading Faktor	Keterangan
Y <sub>1</sub>	Pengelolaan organisasi secara efektif	0,779	Valid
Y <sub>2</sub>	Pengelolaan organisasi secara efisien	0,775	Valid
Y <sub>3</sub>	Tujuan	0,773	Valid
Y <sub>4</sub>	Pertanggung jawaban program	0,894	Valid

Sumber: Data diolah menggunakan *software Smart PLS*

Berdasarkan tabel 4.20 diatas, dapat dijelaskan mengenai nilai *outer loading* untuk setiap indikator dari Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah memiliki nilai  $\geq 0,6$  yang berarti bahwa semua indikator dinyatakan memiliki validitas yang baik dalam menjelaskan variabel latennya (Imam Gozali, 2013:110).

Sedangkan untuk nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dan nilai *communality* disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.21**  
AVE

Variabel Laten	AVE	Communality
X1. Anggaran Berbasis Kinerja	0,657	0,657
X2. Self Assesment System	0,625	0,625
Y.Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	0,651	0,651

Sumber: Data diolah menggunakan *software Smart PLS*

Dan jika dilihat dari nilai AVE dan nilai *communality* di atas setiap variabel laten melebihi batas yang ditentukan yakni  $\geq 0,5$  (Imam Gozali, 2013:212) yang berarti semua variabel laten memiliki validitas yang baik.

b. *Discriminant Validity*

*Discriminant validity* dapat dilihat dari pengukuran *cross loading factor* dengan konstruk dan perbandingan akar AVE dengan korelasi variabel laten. Jika korelasi konstruk dengan pokok pengukuran (setiap indikator) lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya maka konstruk laten memprediksi indikatornya lebih baik dari konstruk lainnya (Imam Gozali, 2013:212). Nilai *cross loadings factor* disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.22

*Cross Loading Factor*

	Anggaran Berbasis Kinerja (X1)	Sistem Pelaporan keuangan (X2)	Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Y)
X1.1	0,841	0,856	0,885
X1.2	0,852	0,591	0,703
X1.3	0,832	0,556	0,661
X1.4	0,707	0,650	0,644
X2.1	0,555	0,800	0,631
X2.2	0,672	0,756	0,773
X2.3	0,528	0,756	0,585
X2.4	0,821	0,848	0,877
Y1	0,519	0,709	0,779
Y2	0,858	0,640	0,775
Y3	0,661	0,733	0,773
Y4	0,845	0,890	0,894

Sumber: Data diolah menggunakan *software Smart PLS*

Berdasarkan tabel 4.22, terlihat nilai *cross loading* korelasi hampir seluruh konstruk laten untuk indikator yang bersesuaian lebih tinggi daripada konstruk lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel laten telah memenuhi syarat.

Perbandingan nilai akar AVE dengan korelasi setiap variabel laten disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.23**  
Perbandingan Akar AVE dengan Korelasi Variabel Laten

Variabel Laten	AKAR AVE	Korelasi Antar Variabel Laten		
X <sub>1</sub>	0,810	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	Y
X <sub>2</sub>	0,791	X <sub>1</sub>	1,000	
Y	0,807	X <sub>2</sub>	0,834	1,000
		Y	0,906	0,926
				1,000

Sumber: Data diolah menggunakan *software Smart PLS*

Berdasarkan uraian di atas, ukuran *cross loadings factor* maupun perbandingan AVE dengan korelasi variabel latennya telah memenuhi syarat, sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat *discriminant validity* pada variabel telah terpenuhi.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam *Partial Least Square (PLS)* dapat menggunakan *Composite Reliability (CR)*, yang disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.24**  
*Composite Reliability*

Variabel Laten	<i>Composite Reliability</i>
Anggaran Berbasis Kinerja(X1)	0,884
Sistem Pelaporan keuangan (X2)	0,869
Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Y)	0,882

Sumber: Data diolah menggunakan *software Smart PLS*

Berdasarkan tabel di atas, nilai *Composite Reliability (CR)* setiap variabel laten melebihi 0,7 (Yamin dan Kurniawan, 2011 dalam Uce Indahyanti, 2013) sehingga model dinyatakan memiliki reliabilitas yang tinggi.



### 3. Evaluasi *Fit Test Of Combination Model* (Seluruh Model)

Uji kecocokan seluruh model gabungan (*fit test of combination model*) adalah uji kecocokan untuk memvalidasi model secara keseluruhan, menggunakan nilai *Goodness of Fit* (GoF). GoF merupakan ukuran tunggal yang digunakan untuk memvalidasi performa gabungan antara model pengukuran dan model struktural, yang diperoleh dari akar nilai rata-rata *communality* dikalikan dengan akar nilai rata-rata *R-square* (Vinzi, dkk, 2010 dalam Uce Indahyanti, 2013). Nilai GoF terbentang antara 0-1 dengan interpretasi 0,1 (GoF kecil); 0,25 (GoF moderat); dan 0,36 (GoF substansial), serta lebih besar dari 0,36 (GoF Kuat) (Uce Indahyanti:2013).

**Tabel 4.25**  
**Hasil Nilai GoF**

	<i>Communality</i>	<i>R Square</i>
<b>Variabel Y</b>	0,651	0,917
<b>Perkalian</b>	0,597	
<b>Nilai GoF</b>	0,773	

Sumber: Data diolah menggunakan *software Smart PLS*

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai *Goodness of Fit* (GoF) yang didapat dari hasil perkalian dari nilai *communality* dan *R-square* sebesar 0,597. Nilai GoF sebesar 0,773 menurut Uce Indahyanti, 2013 tergolong kuat atau tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji kecocokan model *goodness of fit* sudah tergolong tinggi.

#### 4.1.5.2 Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan nilai koefisien *path* dan *t-values* yang disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.26**  
**Nilai Koefisien Jalur Struktural dan Uji Signifikansi Hipotesis**  
*(Path Coefficients)*

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>T Statistics ( O/STERR )</i>
<b>Anggaran Berbasis Kinerja (X<sub>1</sub>) -&gt; Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Y)</b>	0,439	8,987
<b>Sistem Pelaporan keuangan (X<sub>2</sub>) -&gt; Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Y)</b>	0,560	11,608

Sumber: Data diolah menggunakan *software Smart PLS*

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai koefisien jalur struktural X<sub>1</sub> terhadap Y sebesar 0,439 dan koefisien jalur struktural X<sub>2</sub> terhadap Y sebesar 0,560. Dengan demikian maka diperoleh model persamaan struktural sebagai berikut :

$$Y = 0,439X_1 + 0,560X_2 + \zeta$$

Keterangan :

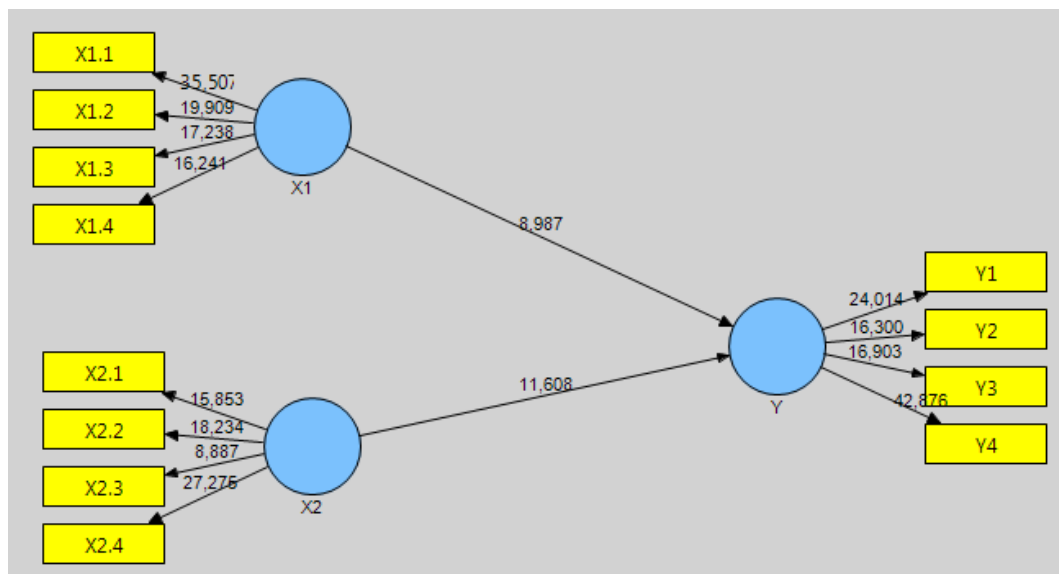
Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah

X<sub>1</sub> = Anggaran Berbasis Kinerja

X<sub>2</sub> = Sistem Pelaporan keuangan

ζ = Residual atau *Error*

Jika digambarkan, model tersebut dapat disajikan sebagai berikut :



Sumber: Data diolah menggunakan *software Smart PLS*

**Gambar 4.3**  
Nilai *Path Coefficient*

Dari persamaan tersebut, terlihat bahwa koefisien jalur struktural variabel Anggaran Berbasis Kinerja ( $X_1$ ) lebih kecil dari variabel Sistem Pelaporan keuangan ( $X_2$ ), yang mengindikasikan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja ( $X_1$ ) cenderung memiliki pengaruh lebih kecil dari pada Sistem Pelaporan keuangan ( $X_2$ ) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah ( $Y$ ). Untuk melihat presentase pengaruh dari setiap variabel laten eksogen terhadap variabel endogen, berikut disajikan koefisien determinasi parsial dan simultan ( $R^2$ ) yang merupakan hasil kali dari koefisien jalur struktural dengan korelasi dengan variabel laten endogen.

**Tabel 4.27**  
Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

	Koefisien Jalur Struktural	Korelasi dengan Y	Pengaruh (%)
Anggaran Berbasis Kinerja ( $X_1$ ) - > Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah ( $Y$ )	0,439	0,906	39,8%
Sistem Pelaporan keuangan ( $X_2$ ) -	0,560	0,926	51,9%

> Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Y)			
<b>TOTAL PENGARUH (<math>R^2</math>)</b>			91,7%

Sumber: Data diolah menggunakan *software Smart PLS*

Penjelasan untuk tabel di atas adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Berbasis Kinerja memberikan kontribusi pengaruh sebesar 39,8% terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.
2. Sistem Pelaporan keuangan memberikan kontribusi pengaruh sebesar 51,9% terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.
3. Pada tabel di atas, terlihat nilai *R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,917 atau 91,7%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja ( $X_1$ ) dan Sistem Pelaporan keuangan ( $X_2$ ) secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 91,7% terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Y), sedangkan sebanyak (*1-R Square*) 8,3% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti ( $\zeta$ ) seperti kompleksitas tugas, gender, etika, skeptisme, tekanan ketaatan, kompetensi.

#### 4.1.5.3 Pengujian Hipotesis

Untuk melihat apakah pengaruh yang diberikan oleh kedua variabel laten eksogen tersebut signifikan atau tidak, dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut :

- a) **Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja ( $X_1$ ) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Y) (Hipotesis 1)**

$H_0$  : Anggaran Berbasis Kinerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah pada 105 orang dari Sub Bagian BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

$H_a$  : Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah pada 105 orang dari Sub Bagian BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

Taraf signifikansi ( $\alpha$ ) yang digunakan adalah sebesar 0,10 atau 10%

Kriteria pengambilan keputusan:

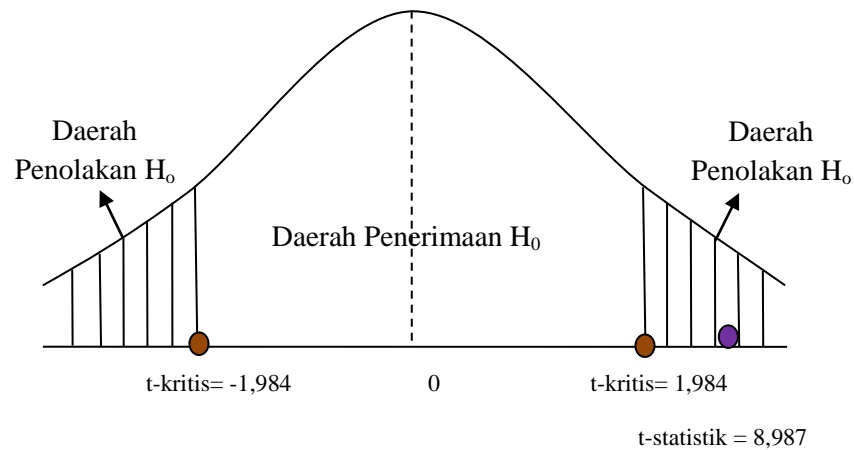
1. Tolak  $H_0$  dan terima  $H_a$  jika nilai  $t_{hitung} > t_{kritis}$
2. Terima  $H_0$  dan tolak  $H_a$  jika nilai  $t_{hitung} < t_{kritis}$

**Tabel 4.28**  
**Uji  $t$  Anggaran Berbasis Kinerja ( $X_1$ ) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Y)**

Latent Variable	Koefisien Jalur	$t_{statistik}$	$t_{kritis}$	Keterangan	Kesimpulan
$X_1 \rightarrow Y$	0,439	8,987	1,984	$H_0$ ditolak	Signifikan

Sumber: Data diolah menggunakan *software* PLS

Berdasarkan tabel di atas, nilai  $t_{statistik}$  untuk variabel  $X_1$  diperoleh sebesar 8,987. Nilai tersebut lebih besar dari 1,984, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ , artinya bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah pada 105 orang dari Sub Bagian BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan kontribusi pengaruh sebesar 39,8%. Jika digambarkan, nilai  $t_{statistik}$  dan  $t_{kritis}$  untuk pengujian parsial  $X_1$  tampak sebagai berikut :



**Gambar 4.4**  
Kurva Uji Hipotesis Variabel  $X_1$  terhadap  $Y$

**b) Keterkaitan Sistem Pelaporan keuangan ( $X_2$ ) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah ( $Y$ ) (Hipotesis 2)**

$H_0$  : Sistem Pelaporan keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah pada 105 orang dari Sub Bagian BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

$H_a$  : Sistem Pelaporan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah pada 105 orang dari Sub Bagian BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

Taraf signifikansi ( $\alpha$ ) yang digunakan adalah sebesar 0,10 atau 10%.

Kriteria pengambilan keputusan:

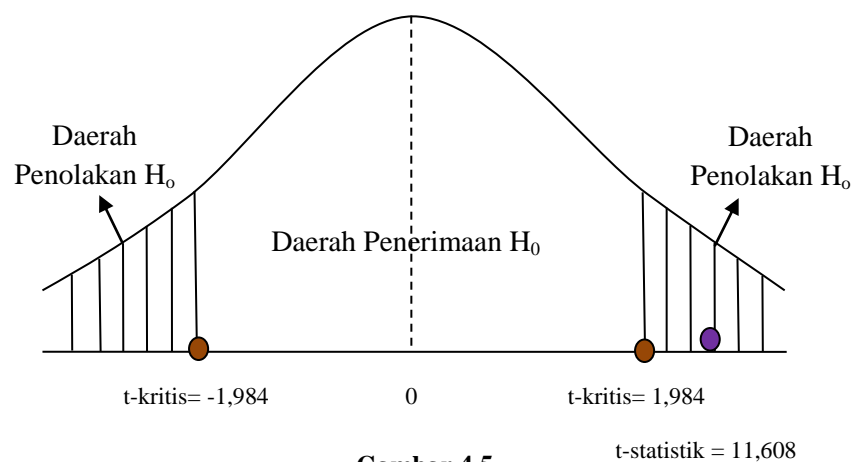
1. Tolak  $H_0$  dan terima  $H_a$  jika nilai  $t_{hitung} > t_{kritis}$
2. Terima  $H_0$  dan tolak  $H_a$  jika nilai  $t_{hitung} < t_{kritis}$

**Tabel 4.29**  
Uji  $t$  Sistem Pelaporan keuangan ( $X_1$ ) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah ( $Y$ )

Latent Variable	Koefisien Jalur	$t_{statistik}$	$t_{kritis}$	Keterangan	Kesimpulan
$X_2 \rightarrow Y$	0,560	11,608	1,984	$H_0$ ditolak	Signifikan

Sumber: Data diolah menggunakan *software* PLS

Berdasarkan tabel di atas, nilai  $t_{\text{statistik}}$  untuk variabel  $X_2$  diperoleh sebesar 11,608. Nilai tersebut lebih besar dari 1,984, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ , artinya bahwa Sistem Pelaporan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah pada 105 orang dari Sub Bagian BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan kontribusi pengaruh sebesar 51,9%. Jika digambarkan, nilai  $t_{\text{statistik}}$  dan  $t_{\text{kritis}}$  untuk pengujian parsial  $X_2$  tampak sebagai berikut:



**Gambar 4.5**  
Kurva Uji Hipotesis Variabel  $X_2$  terhadap  $Y$

## 4.2 Pembahasan

Pada bagian pembahasan ini, akan dijelaskan pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

### 4.2.1 Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah. Sementara nilai korelasi antara Anggaran Berbasis Kinerja

dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah adalah sebesar 0,906. Nilai 0,906 menurut Sugiyono (2013:250) termasuk kategori sangat kuat dengan nilai positif. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, dimana semakin tinggi Anggaran Berbasis Kinerja maka akan semakin membuka peluang terjadinya Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa  $t$  hitung untuk Anggaran Berbasis Kinerja ( $X_1$ ) sebesar 8,987 dengan nilai  $t$  tabel sebesar 1,984. Dikarenakan nilai  $t$  hitung lebih besar dari nilai  $t$  tabel ( $8,987 > 1,984$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya signifikan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah pada 105 orang dari Sub Bagian BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Besarnya Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yaitu sebesar 39,8% dan sisanya sebesar 60,2% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Adapun fenomena yang berkaitan dengan Namun pada kenyataannya, Sumiyati (2015) selaku Kepala Badan pendidikan dan pelatihan Keuangan mengemukakan bahwa, terjadi empat permasalahan dalam implementasi anggaran berbasis kinerja, permasalahan itu menyangkut governance, ownership pimpinan, SDM dan sistem informasi. Dalam governance mempunyai masalah dalam penerapannya, apakah sudah menggunakan prinsip *let's managers manage?* Seharusnya yang di fokuskan pengendalian pada *outcome/output*, tidak hanya



pada inputnya saja. Dan dalam sistem peranan auditor harus dapat membangun sistem, bukan hanya mengejar kesalahan, tetapi perbaiki arsitektur kinerja dalam proses kedepan. Sedangkan dalam permasalahan dalam ownership pimpinan perlu memiliki waktu untuk membangun *logic model*, pada tingkat strategis. Perlu *proses* yang intensif untuk membangun *logic model* antar instansi dan terakhir permasalahan dalam SDM, semua manajer perlu menguasai tentang arsitektur kinerja dan *logic model*. Hal ini sangat krusial disaat manajer suatu organisasi tidak membangun pola *logic model* dengan baik, maka akan membuat penilaian akuntabilitas terhadap kinerjanya pun akan menurun, karena peran manajer yang memiliki kuasa akan sedikit menyulitkan.

Hal ini sesuai dengan peneliti temukan di lapangan yaitu dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 63,52% dan termasuk kategori cukup baik yang artinya Anggaran Berbasis Kinerja cukup baik. Namun masih terdapat *gap* sebesar 36,48% yang merupakan masalah yang ada pada Anggaran Berbasis Kinerja.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori Dedi Nordiawan (2011:27) bahwa kelemahan anggaran berbasis kinerja hanya sedikit dari pemerintah pusat dan daerah yang memiliki staf anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan memadai untuk mengidentifikasi unit pengukuran dan melaksanakan analisis biaya dan banyak jasa dan aktivitas pemerintah telah secara khusus dibuat dengan dasar anggaran yang dikeluarkan, terkadang aktivitas diukur biaya secara detail dan pengukuran secara detail lainnya tanpa adanya pertimbangan memadai yang

diperlukan atau tidak adanya aktivitas itu sendiri. Menurut Mursyindi (2013:58) Anggaran berbasis kinerja melakukan pengklasifikasian akun-akun dalam setiap anggaran berdasarkan dengan menggunakan standar biaya untuk memperoleh efisiensi maksimal yang anggarannya disusun berdasarkan pada perkiraan biaya perunit standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang akan dilakukan dalam periode tersebut.

Dan didukung oleh penelitian terdahulu oleh Laura Wahdatul, Sri Rahayu, Vaya Juliana Dillak (2016) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan. Menurut Komang Sri Endrayani (2014) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.

#### **4.2.2 Pengaruh Sistem Pelaporan keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Sistem Pelaporan keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah. Sementara nilai korelasi antara Sistem Pelaporan keuangan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah adalah sebesar 0,926. Nilai 0,926 termasuk kategori sangat kuat dengan nilai positif. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara Sistem Pelaporan keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, dimana Sistem

Pelaporan keuangan akan memperbesar peluang terjadinya Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa  $t$  hitung untuk Sistem Pelaporan keuangan ( $X_2$ ) sebesar 11,608 dengan nilai  $t$  tabel sebesar 1,984. Dikarenakan nilai  $t$  hitung lebih besar dari nilai  $t$  tabel ( $11,608 > 1,984$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya signifikan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dipengaruhi secara signifikan oleh Sistem Pelaporan keuangan. Besarnya pengaruh Sistem Pelaporan keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yaitu sebesar 51,9% dan sisanya sebesar 48,1% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Adapun fenomena Pada tahun 2014 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa Pemerintah Kota Bandung yang masih bermasalah dalam hal laporan keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Bandung. Penilaian itu menunjukkan bahwa belum ada perkembangan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bandung sehingga Pemerintah Kota Bandung terus gagal mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Masalah yang paling utama yang dialami oleh Pemerintah Kota Bandung yaitu masalah pengelolaan asset dimana beberapa asset milik pemerintah kota Bandung belum teradministrasi dengan baik dan juga asset-aset yang statusnya masih tidak jelas. Berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), persoalan asset

tersebut menyangkut asset tetap yang belum tertib yaitu penyajian asset tetap yang belum didukung dengan daftar rincian, pencatatan ganda, dan penomoran atau kodefikasi yang belum dilakukan sehingga harus dibentuk pansus penataan asset daerah yang bertugas mendata ulang lebih rinci jumlah asset milik Pemerintah Kota Bandung.

Menurut Holid Nurjamila (2017) Selaku Ketua Pusata Kajian Politik Ekonomi Pembangunan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan Daerah memperoleh nilai 50-65 atau peringkat “CC” , hal ini dikarenakan ketidakmampuan Pemkab dalam mendefinisikan kinerja, ketidakmampuan menyusun indikator kinerja, serta ketidakselarasan antara perencanaan dengan penganggaran selain itu LAKIP masih bersifat dokumentasi atau formalitas, belum banyak yang mengarah pada peningkatan kualitas implementasi belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa Sistem Pelaporan keuangan mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 64,62% dan termasuk kategori cukup baik yang artinya Sistem Pelaporan keuangan cukup baik. Namun masih terdapat *gap* sebesar 35,38% yang merupakan masalah yang ada pada Sistem Pelaporan keuangan.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori Indra Bastian (2010:297) laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Mahmudi (2016:251) menyatakan bahwa instansi pemerintah harus membangun dan memiliki Sistem

Pelaporan Keuangan yang baik . Seringkali terjadinya berbagai kasus korupsi, penyelewengan keuangan negara, pemborosan anggaran, inefisiensi organisasi, dan kualitas laporan keuangan pemerintah yang buruk salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya sistem laporannya .

Sedangkan Erlina Rasdianto (2013:6) mengatakan bahwa sistem pelaporan keuangan adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah.

Teori di atas didukung oleh berbagai penelitian seperti yang dilakukan oleh Laura Wahdatul, Sri Rahayu, Vaya Juliana Dillak (2016) hasil penelitian mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menurut Ni Made Mega Cahyani(2015) hasil penelitiannya menunjukkan Sistem pelaporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan arah hubungan yang positif.